

2023

BAHAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



**BAPPEDA PROVINSI
SUMATRA BARAT**
**JL. Khatib Sulaiman no.1
Padang**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan urusan yang diampu sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan kinerja instansi.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif kepada segenap lapisan masyarakat dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencapai "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Padang, Januari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Kepala,



Medli Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750502 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administratif Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

1.1.2 Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

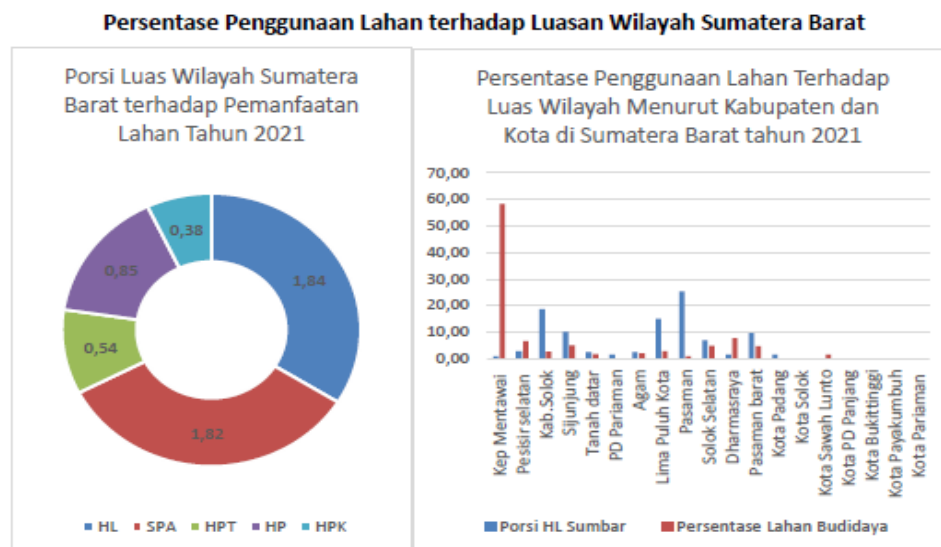
Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara

dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 wilayah administratif dengan 12 Kabupaten dan 7 Kota, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang dengan luas daerah terkecil, yaitu 23,0 km² (0,05%). Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok

dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Grafik 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Gambar atas memperlihatkan bahwa porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka alam dan perlindungan alam, sedangkan lahan untuk hutan produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi, oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan menjadi sangat penting.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,350C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb.

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, Sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98° 36'-101° 53' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Utara sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ Km}$ sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar berikut :

Gambar 1.1



1.1.3 Jumlah Kabupaten dan Kota

Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat sama seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia yang memiliki struktur pemerintahan yang dimulai dari Gubernur hingga desa. Desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah Nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam berikut .

Tabel 1.1

**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1	Kab. Agam	1.804,30	16	0	92	0
2	Kab. Dharmasraya	2.961,13	11	0	52	0
3	Kab. Kepulauan Mentawai	6.011,35	10	0	0	43
4	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	13	0	79	0
5	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	17	0	103	0
6	Kab. Pasaman	3.947,63	12	0	62	0
7	Kab. Pasaman	3.887,77	11	0	90	0

	Barat					
8	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	15	0	182	0
9	Kab. Sijunjung	3.130,40	8	0	61	1
10	Kab. Solok	3.738,00	14	0	74	0
11	Kab. Solok Selatan	3.346,20	7	0	39	0
12	Kab. Tanah Datar	1.336,10	14	0	75	0
13	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	0	0
14	Kota Padang	693,66	11	104	0	0
15	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	0	0
16	Kota Pariaman	66,13	4	16	0	55
17	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	0	0
18	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	0	27
19	Kota Solok	71,29	2	13	0	0
20	Provinsi Sumatera Barat	42.021,89	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Sedangkan untuk data kependudukan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang disusun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) didapat jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 5.701.545 jiwa dengan sebaran sebagai berikut .

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH
KABUPATEN		
1	Pesisir Selatan	524.608
2	Solok	405.712
3	Sijunjung	242.188

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH
4	Tanah Datar	378.309
5	Padang Pariaman	313.454
6	Agam	527.451
7	Lima Puluh Kota	395.307
8	Pasaman	306.616
9	Kep. Mentawai	93.313
10	Dharmasraya	234.509
11	Solok Selatan	183.177
12	Pasaman Barat	441.773
KOTA		
13	Padang	928.541
14	Solok	79.703
15	Sawahlunto	68.054
16	Padang Panjang	61.559
17	Bukittinggi	135.489
18	Payakumbuh	144.272
19	Pariaman	99.484
Sumatera Barat		5.701.545

Sumber Data : Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat DKB Semester I Tahun 2023

1.2 Perencanaan Pembangunan

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode RPJMD sebelumnya terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani yang berhubungan dengan dan sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
- 3) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
- 4) Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
- 5) Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- 6) Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
- 7) Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
- 8) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- 9) Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 2) Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 3) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,

- 5) Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
- 7) Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- 9) Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
- 10) Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
- 3) Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/keterampilan dengan lapangan kerja, karena masih belum idealnya kondisi sekolah kejuruan sehingga mutu pendidikan kejuruan masih belum optimal mampu menghasilkan menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan masyarakat.
- 4) Masih perlunya upaya peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal.
- 5) Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan.
- 7) Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
- 8) Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
- 9) Masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
- 10) Belum optimalnya distribusi guru, diantaranya karena sebaran guru belum merata antara perkotaan dan perdesaan.
- 11) Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasanana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 12) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

- 13) Masih terbatasnya akses digitalisasi pendidikan dan adopsi teknologi yang mendukung pembelajaran.
- 14) Masih belum optimalnya implementasi merdeka belajar.
- 15) Belum meratanya kemampuan guru untuk berinovasi dan menyesuaikan proses pembelajaran di adaptasi kebiasaan baru yang berorientasi kepada murid dan sesuai dengan situasi lokal.
- 16) Masih perlunya strategi yang beragam dan intensif pelibatan keluarga dan masyarakat (pendidikan keluarga) di satuan pendidikan dalam mendukung pembelajaran siswa terutama masa adaptasi kebiasaan baru.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- 1) Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
- 2) Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
- 3) Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
- 4) Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
- 5) Penanggulangan HIV/AIDS.
- 6) Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
- 7) Belum optimalnya kepesertaan dan layanan dalam jaminan kesehatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- 8) Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
- 9) Akreditasi Rumah Sakit,
- 10) Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
- 11) Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
- 12) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 13) Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
- 14) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
- 15) Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
- 16) Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

- 1) Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok oleh masyarakat
- 2) Belum optimalnya distribusi dan pengawasan pangan
- 3) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan serta masih tingginya ketergantungan pada pangan beras,
- 4) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
- 5) Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
- 6) Rendahnya daya beli masyarakat akibat berfluktuasinya Harga bahan pangan
- 7) Penanganan masalah keamanan pangan
- 8) Kurangnya peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
- 9) Masih rendahnya daya saing produk pertanian,
- 10) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian,
- 11) Belum optimalnya peningkatan Produktivitas, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,
- 12) Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
- 13) Ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
- 14) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
- 15) Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
- 16) Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

- 1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
- 2) Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
- 3) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
- 4) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
- 5) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
- 6) Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
- 7) Masih rendahnya Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil
- 8) Masih rendahnya Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi
- 9) Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk ,

- 10) Masih banyak produk industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,
- 11) Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
- 12) Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.
- 13) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
- 14) Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi,
- 15) Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
- 16) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
- 17) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
- 18) Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
- 19) Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
- 20) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.
- 21) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
- 22) Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
- 23) Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
- 24) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
- 25) Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
- 26) Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
- 27) Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
- 28) Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
- 29) Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
- 30) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

- 31) Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
- 32) Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
- 33) Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya)

7. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

- 1) Masih rendahnya Kualitas dan kuantitas benih dan induk
- 2) Masih tingginya Harga pakan ikan pabrikaan
- 3) Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
- 5) Masih rendahnya Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan
- 6) Belum optimalnya Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS)
- 7) Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
- 8) Masih rendahnya Konsumsi ikan masyarakat
- 9) Masih rendahnya Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan)
- 10) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
- 11) Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh

8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

- 1) Belum optimalnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan dasar daerah tertinggal.
- 2) Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya.
- 3) Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan.
- 4) Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdikan dan berusaha di perdesaan.
- 5) Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan.
- 6) Lembaga keuangan mikro di perdesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
- 7) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

- 1) Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
- 2) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- 3) Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- 4) Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
- 5) Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
- 6) Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
- 7) Masih rendahnya pencapaian target Universal Access, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
- 8) Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
- 9) Belum optimal konektivitas dan aksesibilitas antar daerah
- 10) Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Belum optimalnya penyebaran informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
- 2) Belum memadainya sarana prasarana penanggulangan bencana
- 3) Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
- 4) Belum optimalnya Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam.
- 5) Masih belum terpenuhinya kebutuhan ketersediaan air,
- 6) Adanya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
- 7) masih rendahnya kualitas air, udara dan lahan
- 8) Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana
- 9) Belum optimalnya pemulihan daerah pasca bencana

1.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dari permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didapat isu strategis yang menjadi perhatian dalam tahun 2023, antara lain :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

1.2.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI

A. Jangka Panjang

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah “Menjadi Provinsi Berkemajuan Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025”.

B. Jangka Menengah

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026 sebagai gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi,

menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturasikan sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

MISI

A. Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah jangka panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”,
- 2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,
- 3) Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
- 4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

B. Jangka Menengah

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- 2) Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
- 3) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 4) Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
- 5) Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- 6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 7) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

1.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Menurunnya prevalensi stunting
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik	1. Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
		2. Meningkatnya Budaya Literasi

Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah		3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1. Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor

		5. Meningkatnya pertumbuhan investasi
		6. Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
		3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7:	1. Terwujudnya kualitas	1. Terwujudnya kualitas

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir penetapan tema RKP 2023 dan juga dengan mempertimbangkan Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yakni : “Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”.

Peningkatan produktifitas pada sektor strategis daerah diarahkan kepada sektor pertanian, pengolahan, UMKM dan pariwisata dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

- b. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
- e. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan

Sementara, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2023 yakni sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator	Target 2023
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		
1.	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73,23
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,98

No	Indikator	Target 2023
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,43
4.	Rata-rata lama sekolah	9,28
5.	Harapan Lama Sekolah	14,06
6.	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,75
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah		
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,90
2.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80
3.	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	14
4.	Indeks Pembangunan keluarga	61,38
5.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,25
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,01
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,19
3.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98
4.	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	48.590
5.	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	41.611
6.	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	50.265

No	Indikator	Target 2023
7.	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
8.	Indeks Ketahanan Pangan	80,21
9.	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital		
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,70
2.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,88
3.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,00
4.	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379
5.	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18
6.	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
7.	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	130.482
8.	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00
9.	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan		
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13,89
2.	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24
3.	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		

No	Indikator	Target 2023
1.	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,731
2.	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,676
3.	Kemantapan Jalan (%)	77,00
4.	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,63
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,95
6.	Akses Air Minum (%)	84,00
7.	Akses Sanitasi Layak (%)	84,00
8.	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	55,55
9.	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	71,92
10.	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	55,28
11.	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	68,27
12.	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	87,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas		
1.	Indeks reformasi birokrasi	69,50
2.	Nilai SAKIP (predikat)	BB (78,00)
3.	Nilai EPPD (skor)	3,0030
4.	Opini laporan keuangan (opini)	WTP
5.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	38,25
6.	Indeks SPBE (indeks)	3,30

No	Indikator	Target 2023
7.	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	76,00
8.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	86

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Sumbar Sehat dan Cerdas

Pembangunan Sumatera Barat menjadikan keunggulan sumberdaya manusia sebagai pondasi pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan dalam makna pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini dibangun ditengah suasana pandemi covid-19. Pada saat bersamaan, pembangunan manusia Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam pembangunan kesehatan yang diindikasikan oleh masih rendahnya usia harapan hidup. Kesehatan diartikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental serta sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik.

Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing.

Sumbar sehat dan cerdas ditandai dengan : Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru, Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru, Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen, Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan

Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan, Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.

2. Sumbar Religius dan Berbudaya

Masyarakat Sumatera Barat memiliki keunggulan budaya dalam membangun konsensus sosial yang mampu memadukan antara adat dan budaya dalam filosofi Adai Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah. Masyarakat Sumatera Barat dikenal pula sebagai masyarakat yang agamais. Keunggulan budaya ini dapat menjadi modal dasar yang kuat sebagai pilar pembangunan yang berakar dari jati diri masyarakat. Sumatera Barat telah berkembang sebagai masyarakat yang majemuk secara suku, agama dan ras yang dapat hidup secara harmonis dan toleransi dengan tetap menguatkan jati diri budayanya masing-masing. Perkembangan globalisasi turut mempengaruhi budaya masyarakat yang membutuhkan ketahanan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai budaya masyarakat terutama bagi generasi muda saat ini dan masa mendatang.

Sumbar religius dan berbudaya ditujukan untuk : Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah , lembaga pendidikan agama , Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism), Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

3. Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Pengembangan sektor perdagangan, UMKM dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat

Sumatera Barat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk : Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital, Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4. Sumbar Berkeadilan

Pembangunan di berbagai bidang mensyaratkan daya dukung infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat pergerakan orang dan barang untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyediaan infrastruktur memiliki keberlanjutan secara sosial dengan memperhatikan unsur keadilan. Infrastruktur berkeadilan meliputi dimensi antar ruang atau wilayah-wilayah dan daerah, dimensi waktu antar tahun dan antar generasi, serta keadilan antar sektor baik sektor ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Berkeadilan juga dalam penyediaan layanan pemerintah yang berkualitas dan menjangkau lapisan masyarakat secara luas

Sumbar berkeadilan ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentrasentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas, Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat

pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).

1.2.5 Kegiatan Pembangunan Daerah

Kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang mendukung Program Prioritas Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	
	APK SLB	%	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana Prasarana Sekolah	Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana Prasarana Sekolah	Sekolah	
	tertib administrasi umum	Bulan	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah MenengahKejuruan	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana	Sekolah	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Prasarana Sekolah		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Kegiatan	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	%	
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terpenuhi kebutuhan Pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Sekolah	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%	
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Menengah	Sekolah	
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Khusus	Sekolah	
PROGRAM	Jumlah modul dan	dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	bahan ajar bahasa daerah yang disusun		
	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rujukan tingkat provinsi yang	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	berkualitas		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pendukung Akreditasi	persen	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Terlaksananya Pembayaran Jasa Penanganan Bencana	Bulan	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Jumlah pengadaan prasarana fasilitas di rumah sakit	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang tersedia	Kali	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	
	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	
	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	
	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA	kabupaten/kota	
	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi	kabupaten/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	malaria		
	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	
	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	
	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya mutu pelayanan di UPTD BKOM & Pelkes	kegiatan	
	Meningkanya mutu pelayanan di Rumah sakit	bulan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Meningkatnya Rumah sakit dan Laboratorium Daerah yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	Persentase	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya penyediaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	Persentase	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya penyediaan layanan kesehatan	Persentase	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Terlaksananya pengadaan kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan Alkes untuk UKP	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TingkatDaerah Provinsi	Jasa Tenaga Kesehatan/Vakasi Dokter Spesialis dan Sub Spesialis	Bulan	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Suravey Akreditasi RS	Kegiatan	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	persen	
PROGRAM PENINGKATAN	Jumlah SDM kesehatan	Orang	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	yang ditingkatkan kompetensinya		
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	
	Akreditasi Institusi pelatihan	strata	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	Orang	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Meningkatnya perencanaan kebutuhan SDMK	Persentase	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan Tenaga Kesehatan	kegiatan	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
MAKANAN MINUMAN	ketentuan perizinan berusaha		
	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Meningkatnya Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	
	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota	
	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kab/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat DaerahProvinsi	Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kab/kota	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kab/kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas DaerahKabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	kab/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	D.I	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LintasKabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	Laporan	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DANPENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	
Pengembangan Sistem dan PengelolaanPersampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/Pengemb angan TPA Sampah Regional	TPA	
PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AirLimbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Kab/Kota	
PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer	Km	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahProvinsi	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakayaan	Laporan	
	Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Unit	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan	kawasan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	lingkungannya		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera	Laporan	
	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakarya	Laporan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	%	
	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	%	
	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Laporan	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	
	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma,	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	standar, prosedur dan kriteria		
	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terselenggaranya pelatihan tenaga ahli konstruksi	Laporan	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Laporan	
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tersedianya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	Dokumen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	Perda	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Tata Ruang		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Perumwaski m
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	%	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persen	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Orang	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi untuk Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Persen	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN			Kesbangpol

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	%	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditindaklanjuti	%	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat dibina	%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penyebarluasan Data Dan Informasi Kebencanaan	%	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kelembagaan dan masyarakat yang siap	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	menghadapi bencana		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat yang Dilaksanakan	%	
Penataan Sistem Dasar PenanggulanganBencana	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan BencanaKebakaran	Pemetaan rawan bencana kebakaran yang disusun	Dokumen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	nilai	
Pemberdayaan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pilar Sosial	Kegiatan	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Orang	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Kegiatan	
Rehabilitasi Sosial Dasar	Terlaksananya	Kegiatan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Lanjut Usia Terlantar didalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Kegiatan	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	orang	
	Persentase Data Fakir Miskin yang valid	%	
	Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen	
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang dilakukan proses pengangkatan anak	Kegiatan	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	darurat bencana provinsi		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksannya pemberian bantuan terhadap korban bencana Sosial dan Alam	Kegiatan	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	%	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pelestarian TMP	TMP	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	dokumen	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang dilatih Pemerintah dan LPKS	persen	
Pelaksanaan Akreditasi	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Lembaga Pelatihan Kerja	terakreditasi		
	Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	persen	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	persen	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	persentase meningkatnya produktivitas tenaga kerja	persen	
	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	persen	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	%	
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	persen	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	persen	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Persentase peningkatan perusahaan yang melakukan peraturan	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota	perundang-undangan dan program BPJS Ketenagakerjaan		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang disahkan PP/PKB, SP/SB	persen	
	Persentase Jumlah perusahaan yang berselisih	persen	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	SK	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perusahaan yang melaksanakan	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Ketenagakerjaan	SMK3		
	Jumlah pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan	perusahaan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Dinas P3A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan PUG dan PPRG	kab/kota	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat	Kabupaten/Kota	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi perempuan	Kabupaten/Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kab/kota	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan	Org	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan PerempuanKewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan	kab/kota	
	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan	Kab/Kota	
PROGRAM PENINGKATAN	Indeks Kualitas	indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
KUALITAS KELUARGA	Keluarga		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Kabupaten/Kota	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kab/kota yang terfasilitasi pembinaan untuk layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab/Kota	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terdapat dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam kelembagaan data kewenangan provinsi	Kabupaten/Kota	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganProvinsi	Terlaksananya upaya Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia usaha kewenangan provinsi	Kabupaten/Kota	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kesejahteraan dan perlindungan anak se Sumatera Barat	Kab/Kota	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab/Kota	
	Jumlah anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	orang	
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Terlaksanya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Kabupaten/Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Kabupaten/Kota			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab/Kota	
	Terlaksanannya Koordinasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layana anak yang memerlukan perlindungan khususn bagi	Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			Dinas Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGAN Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Thun	
	Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	Terkendalnya stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %)	komoditi	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
	Terkendalinya stabilitas harga (beras, cabe, bawang merah) (kenaikan dan penurunan harga < 50)	Komoditi	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase tertanggulangnya permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/ gejala harga/keadaan darurat	%	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Sumatera Barat	%	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	tersedianya peta kerentanan pangan	dokumen	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase berkurangnya kerawanan pangan masyarakat	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Berkurangnya kerawanan pangan masyarakat	Kab/Kota	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasyarakatan sistem mutu, pengawasan keamanan pangan segar di tingkat produsen (premarket) dan pangan yang beredar di masyarakat (post market) melalui uji laboratorium dan penerbitan sertifikat Prima, register PSAT dan register rumah kemas	%	
	Terlaksananya pemasyarakatan sistem mutu, pengawasan keamanan pangan segar di tingkat produsen (premarket) dan pangan yang beredar di masyarakat (post market) melalui uji laboratorium dan penerbitan sertifikat Prima, register PSAT	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	dan register rumah kemas		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	%	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Dokumen	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAHGARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian permasalahan sengketa garapan lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) Daerah provinsi	Dokumen	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	pembangunan		
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian permasalahan pertanahan di provinsi sumatera barat	Laporan	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	%	
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penataan akses dalam pemanfaatan tanah	Dokumen	
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya tertib administrasi pertanahan dalam pengelolaan pemanfaatan tanah	Dokumen	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	%	
Penetapan Tanah Ulayat	Terlaksananya	Laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	pengelolaan pemanfaatan tanah ulayat lintas Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Tanah kosong	Laporan	
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Tersedianya data dan informasi untuk pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat	Laporan	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya sinkronisasi kesesuaian dan keserasian perencanaan penggunaan tanah yang hamparan lintas daerah kab/kota	Laporan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN			Dinas Lingkunga

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
HIDUP			n Hidup
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS	persen	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya	persen	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup	persen	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kejadian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditangani melalui proses rehabilitasi	persen	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan	Kabupaten/Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
TI (KEHATI)	keanekaragaman hayatinya		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase keanekaragaman hayati provinsi yang terkelola	persen	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAHB3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbunan Limbah B3 Sumatera Barat yang dikelolalanjut	persen	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungandan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi sesuai NSPK yang dapat dibina dan diawasi	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan inventarisasi data pengakuan keberadaan MHA, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	persen	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi yang telah diinventarisir/diidentifikasi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	lembaga	
PROGRAM	Persentase	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi	orang/lembaga	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGA N HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani sesuai SOP	persen	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	persen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN	Persentase Kepemilikan KTP	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PENDUDUK	Elektronik		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan, Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Laporan	
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk, Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk, Komunikasi. Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait	laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Pendaftaran Penduduk		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang, g Pencatatan Sipil, Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi, Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting,	laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindex terkait Pencatatan Sipil		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil, Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil, Komunikasi. Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil, "Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil, Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	laporan	
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait	Laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Sipil	Pencatatan Sipil, Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	%	
	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	inovasi	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan	
Penyelenggaraan	Terlaksananya Fasilitasi	laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi, Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi,		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Pendayagunaan Data Kependudukan		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	jenis	
Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain, Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	laporan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Dinas PempdesKB
PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang terbentuk	Desa	
Penatausahaan Penetapan SusunanKelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan Nagari Desa dan Nagari sebagai Desa Adat	Kab Kota	
PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Jumlah Kerjasama Desa	dokumen kerjasama	
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang MenjadiKewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa	Kab Kota	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat	Desa/Nagari/Ke lurahan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	berkembang		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab Kota	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	
	Jumlah LPM Mandiri	LPM	
	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	
	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas pada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kabupaten Kota	Kab Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk	terlaksananya penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat provinsi advokasi dan sosialisasi GDPK, advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	laporan	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah	Terlaksannanya Koordinasi, Penyediaan dan pengolahan data	Kab/Kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Provinsi	kependudukan berbasis keluarga, terlaksananya pemetaan program KKBPK, terlaksannya Model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGABERENCANA (KB)	Prevalensi KB	%	
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya penguatan kerjasama dengan stake holder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi promosi dan KIE program KKBPK	laporan	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian program ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita (KB) bina keluarga remaja (BKR) , bina keluarga lansia (BKL) unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi	laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	keluarga dan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampung kb		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksanannya pembinaan , ketahanan dan kesejahteraan keuarga dan peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana pusat informasi konseling (PIK-R)	laporan	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga	terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan orga	laporan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Dishub
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	terbangun		
	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJProvinsi	Tersusunnya rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	%	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Peningkatan pelayanan di terminal tipe B	Terminal	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan	Dokumen	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase terselenggaranya perekomendasian andalalin	%	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas	Dokumen	
Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	%	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan	Tersedianya pergub dan tersosialisasinya pergub	Dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kepada masyarakat dan stakeholder terkait		
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan dan tersosialisasinya kebijakan jaringan umum trayek antar kota kewenangan provinsi	Dokumen	
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya kebijakan dan tersosialisasinya penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taxi kewenangan provinsi	Dokumen	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data dan perawatan sistem informasi perijinan angkutan umum	Paket	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Tersedianya penetapan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi	Trayek	
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan PengumpanRegional	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan laut	Dokumen	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan PengumpanRegional	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	laporan dan dokumen	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan pelabuhan	Laporan	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dan	Dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	penertipan perijinan usaha angkutan laut		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya penyusunan rencana induk perkeretaapian di sumatera barat	Dokumen	
Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan penertiban izin usaha, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum di sumbar	Laporan	
Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersusunnya data kelas stasiun pada jaringan jalu KA di Sumbar	Dokumen	
Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya data dan rekomendasi persyaratan izin operasi sarana perkeretaapian	Laporan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Tersusunnya kebijakan penetapan jaringan pelayanan KA	Dokumen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan Program strategis Pemerintah	%	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo	OPD	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks SPBE	Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Provinsi			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			Disperinda g
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPANPINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin usaha simpan pinjam	Koperasi	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Koperasi	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Jumlah koperasi sehat	koperasi	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam yang dinilai	Koperasi	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kesehatannya		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi pelatihan	Org	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah anggota koperasi lintas daerah yang mengikuti pelatihan	Org	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	koperasi	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang menggunakan IT dalam pengelolaan usaha	Koperasi	
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH,	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Pemberdayaan Usaha Kecilyang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Org	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi UsahaMenengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	Org	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			DPMPSTP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIMPENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Provinsi	Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal	Ranpergub	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketersediaan Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Keikutsertaan DPM- PTSP Dalam Kegiatan Promosi dan Penanaman Modal	event	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Rasio)	Rasio	
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAM	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
AN MODAL			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Invertasi PMA dan PMDN	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data Penanaman Modal yang berbasis teknologi	Dokumen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	
	Jumlah wirausaha muda baru	orang	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda yang Berprestasi	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Kewenangan Provinsi			
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Organisasi Pemuda yang difasilitasi	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase prasarana olahraga di UPTD KBOR Pada Kegiatan PPLP/D Sumbar	%	
	Terlaksannya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Keg	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksannya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Keg	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Persentase jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi	%	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Tercapainya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keg	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi Kepramukaan	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	
	Organisasi Perangkat	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	OPD yang menggunakan data statistik sektoral untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	%	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	persentase perangkat daerah yang menggunakan Persandian untuk pengamanan informasi	%	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandiantar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			Dinas Kebudayaa n
PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Karya Budaya	Karya Budaya	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
KEBUDAYAAN	yang Dilestarikan		
Pengelolaan Kebudayaan yang MasyarakatPelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik	karya budaya	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemangku adat yang dibina	orang	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kotadalam Daerah Provinsi	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	kesenian tradisional	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIANTRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	
Pembinaan Kesenian yang MasyarakatPelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	kesenian tradisional	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal provinsi yang dilakukan pembinaan	dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	
	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan	Cagar Budaya	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang dikelola	cagar budaya	
	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang dilindungi/dikelola	cagar budaya	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	
Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi museum yang dikelola	Koleksi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Perpustakaan tingkat	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PERPUSTAKAAN	Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahProvinsi	Pengelolaan perpustakaan sesuai SNP	Perpustakaan	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahProvinsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi	Kegiatan	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	jumlah	
Pelestarian Karya Cetak dan Karya RekamKoleksi Daerah di Daerah Provinsi	Terhimpun dan bertambahnya koleksi KCKR dan pemberian penghargaan kepada wajib SSKCKR	Kegiatan	
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan BibliografiDaerah	Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah	Terbitan	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terdaftarnya dan terinventarisnya naskah kuno serta pengalihmediaan naskah digital/ebook	Kegiatan	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah DaerahProvinsi	Penambahan dan pengelolaan koleksi Minangkabausiana sesuai kebutuhan	Kegiatan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	pemustaka		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	%	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diselamatkan dan dikelola	SKPD	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Terselenggaranya simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Kegiatan	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	Pencipta Arsip	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat		
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Pencipta Arsip	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota	SKPD	
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Tersedianya daftar arsip statis yang telah dialihmediakan dan diautentikasi	Lembar Arsip	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	regulasi	
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Tersedianya aturan/prosedur dan daftar arsip yang bersifat	SOP dan Daftar	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	tertutup		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			Dinas kelauatan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIRDAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	
	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	
	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	
	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksanannya Pembinaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Kali	
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mildi Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Pengawasan di Kawasan Konservasi	Kawasan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Terlaksananya Sosialisasi Perda RZWP3K dan Pergub. ke Pelaku Usaha	Kali	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANTANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	
	Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	
	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	
	Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	
	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pelestarian sumberdaya perairan umum (Reservaat))	Unit	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pengembangan pelabuhan	Tahun	
	Terlaksananya pengembangan	Tahun	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	pelabuhan		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Tahun	
	Meningkatnya prasarana perikanan tangkap	%	
	Terlaksananya penyediaan prasarana tangkap	%	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Cek Fisik Kapal	org	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	
	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	
	Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	
	Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok pembudidaya yang memiliki izin	Kelompok	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Sarana Produksi benih kerapu dan vanamei	lokasi	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Laut	Lokasi	
	Terlaksananya pengembangan sidat	Tahun	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan di perairan Umum dan Danau Singkarak	kali	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan di Kawasan Konservasi dan Danau	kawasan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
sampai dengan 12 Mil	Singkarak		
	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tahun	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	
	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan bahan baku pengolahan	%	
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pemasaran pengolahan hasil perikanan	%	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah	Terlaksananya pengembangan produk perikanan	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
dan Besar			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIKDESTINASI PARIWISATA	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	
	Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan daya tarik provinsi	kali	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	kegiatan	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) DaerahProvinsi	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kegiatan	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Rata-rata lama tinggal wisman	hari	
	Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	event	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat	kali	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	sub kegiatan	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	
	Persentase pertumbuhan Pelaku	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Ekonomi Kreatif		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Sumbar	kegiatan	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	%	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Sampel vaksin yang terawasi	Sampel	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan SDG hewan	%	
	Persentase peningkatan pengelolaan SDG ternak	%	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terfasilitasinya sarana yang memenuhi standar	Kelompok	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari DaerahProvinsi Lain	Persentase peningkatan populasi ternak	%	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Pengawasan Peredaran Bibit dan Pakan Ternak	%	
	Persentase peningkatan pengawasan peredaran bibit dan pakan ternak	%	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak	%	
	Persentase peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak	%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan PeredaranBenih Tanaman	Penyediaan benih tanaman	komoditi	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Terlaksananya pengawasan mutu benih	kab/kota	
	Terlaksananya Penyaluran Benih Bersertifikat untuk Komoditi Padi	ton	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	kab/kota	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	unit	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase wilayah sumber bibit yang terkelola	%	
Penataan Prasarana Pertanian	Prasarana peternakan yang terfasilitasi	Kawasan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan Prasarana	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	TPHP		
Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Ha	
	Terlaksananya penataan prasarana	unit	
	terlaksananya penataan prasarana pertanian	kab/kota	
	Terlaksananya penataan prasarana pertanian	bulan	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	unitt	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	Sertifikat	
	Sertifikasi petugas dan	Sertifikat	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	UPH yang bersertifikat		
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya unit pemeliharaan dan unit usaha produk hewan	Dokumen	
	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	Dokumen	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar bebas Brucellosis, CSF dan Anthrax (kecuali Kab. Kepulauan Mentawai)	Pos	
	1. Sumbar bebas Brucellosis, CSF dan Anthrax (kecuali Kab. Kepulauan Mentawai), 2. Pos pemeriksaan lalu lintas ternak	Kab/Kota	
	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Pos	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	(satu) Daerah Provinsi yang dilakukan		
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1. Sumbar bebas Brucellosis, CSF dan Anthrax (kecuali Kab. Kepulauan Mentawai), 2. Pos pemeriksaan lalu lintas ternak	Kab/Kota	
	Sumbar bebas Brucellosis, CSF dan Anthrax (kecuali Kab. Kepulauan Mentawai)	Pos	
	jumlah pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pos	
Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan prinsip kesrawan	Unit	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana	kab/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Terlaksananya Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta Pengendalian Dampak Iklim Pertanian	kali	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan usaha peternakan	Dokumen	
Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Terpenuhinya persyaratan untuk penerapan ISO 17025;2017	Dokumen	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan Dan Pengawasan penerbitan Izin usaha pertanian	kab/kota	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	ditingkatkan kompetensinya		
Pengembangan Ketenagaan PenyuluhanPertanian	Persentase kelompok dan SDM yang terfasilitasi	%	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan pengembangan informasi peternakan	%	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan EkonomiPetani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan peterakan yang terfasilitasi	Lembaga	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya diseminasi informasi teknis	kali	
	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian	kab/kota	
Pengembangan Ketenagaan PenyuluhanPertanian	terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	kali	
	Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian	kab/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Kemitraan kelembagaan bagi petani dan petugas	angkatan	
	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi	kab/kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	
	Indeks Tutupan Hutan	indeks	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPHTerlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH	KPH	
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengelolaan rencana tata hutan pada wilayah KPH	KPH	
Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan	Sertifikat	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	tanaman hutan		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya pengelolaan KPH	KPH	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Terlaksananya pemantauan pengolahan HHK dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /Tahun pada wilayah KPH	KPH	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terehabilitasinya lahan diluar kawasan hutan pada wilayah KPH	KPH	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan pada wilayah KPH	KPH	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH	KPH	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Unit	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pelestarian Alam			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsidan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlakasananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH	KPH	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Daerah Aliran Sungai dengan kriteria baik	DAS	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEKKEGEOLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Tersedianya data zona konservasi air tanah	Dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Tanah dalam Daerah Provinsi	pada cekungan air tanah		
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Sumur Bor	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya wilayah izin Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya usaha pertambangan mineral logam dan batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,	Terlaksananya usaha pertambangan rakyat dalam wilayah Provinsi	Dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Sumatera Barat		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Reduksi CO ₂ Bidang Energi (non transportasi)	Ton CO ₂ eq	
	Terlaksananya konservasi energi di Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penatausahaan izin operasi di Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan	Terlaksananya pembangunan sarana tenaga listrik untuk	Dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	daerah terpencil dan kelompok masyarakat tidak mampu		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah dokumen data SIUP, TDP dan SIUP-MB	dokumen	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik	dokumen	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi	Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan	dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	kab/kota	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEbutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting ditingkat distributor	dokumen	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota	kab/kota	
Pengawasan Pupuk dan	Jumlah pembinaan dan	kab/kota	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan kab/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi	event	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah	Jumlah laboratorium yang diperpanjang akreditasinya	labor	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Kabupaten/Kota			
	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian contoh serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	kab/kota	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	orang	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredard dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	kab/kota	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	event	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan atsiri	unit	
	Jumlah wira usaha baru IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis	IKM	
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standarisasi produk, temu usaha, dan bimtek wirausaha baru	IKM	
	Jumlah IKM Logam Mesin yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	IKM	
	Jumlah wira usaha baru atsiri yang mendapatkan bimbingan teknis	wub	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan bimtek IUI dan pengawasan	orang	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha	
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	buku	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	%	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	persen	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	indeks	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah	Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	transmigrasi		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	Indeks	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman di kawasan yang dibangun ekonomi dan sosial budayanya	Satuan Permukiman	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	
	Persentase Kab/kota	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran		
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	%	
	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang- undangan kelembagaan	%	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik)	Skor	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	dokumen	
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang	Lembaga	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	difasilitasi		
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	bulan	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	rumusan	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	rumusan	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	%	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penanganan permasalahan hukum litigasi dan penyelesaian permasalahan hukum non litigasi/HAM	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	
	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	
Pengelolaan Kebijakan dan KoordinasiPerekonomian	Terimplementasinya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	dokumen	
	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SumberDaya Alam	Terimplementasinya pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alan	dokumen	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMDdan BLUD	Terimplementasinya pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	dokumen	
	Terimplementasinya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	dokumen	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANANPENGADAAN	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa	skor	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
BARANG DAN JASA	minimal Baik		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui aturan	%	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pesentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	%	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGU NAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	
	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	%	
	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Peraturan Gubernur	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota, dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat	tahun	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelaporan realisasi fisik & keuangan, analisis	tahun	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	capaian kinerja pembangunan daerah dan kebijakan teknis pembangunan daerah		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Dokumen LPPD	dokumen	
	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	%	
	Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	%	
	Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	%	
	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan	dokumen	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya pelaksanaan tugas pemerintahan	Persen	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	Persen	
SEKRETARIAT DPRD			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	%	
	Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi	%	
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	%	
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	persen	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	persen	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penagwasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi	persen	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	persen	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dan Pengawasan Kode Etik	%	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Untuk Pimpinan Dan Alat Kelengkapan Dewan.	%	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	dokumen	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan	dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	dokumen	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan	dokumen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	Kewilayahan		
KEUANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD	tepat waktu	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	SKPD	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	kabupaten/kota	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	SKPD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan laporan keuangan daerah	SKPD	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan, pemeliharaan, pemanfaatan BMD	persen	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran target pajak daerah yang harus dicapai	rupiah	
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	
Pengadaan, Pemberhentian dan InformasiKepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	Persen	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi	Persen	
	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi	Persen	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
	persyaratan jabatan		
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	orang	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	orang	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif	%	
	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	
	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	
Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya penelitian Bidang Penyelenggaraan	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	%	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase berkembangnya inovasi teknologi kepada masyarakat/Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang	%	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	%	
	Persentase promosi daerah yang dilaksanakan	%	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatnya pelayanan kedinasan di Badan Penghubung	%	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
INSPEKTORAT DAERAH			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	%	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Bisa di Rumuskan	%	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang Dilaksanakan	%	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	Skor Indeks Ketahanan	nilai	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Nasional Gatra Idiologi		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	rekomendasi	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	nilai	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	rekomendasi	
PROGRAM	Ormas yang	%	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	melaksanakan aktivitas sesuai regulasi		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	rekomemendasi	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	rekomendasi	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional	rekomendasi	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	OPD Pelaksana
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dan penanganan konflik sosial.		

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Secara umum, capaian kinerja makro Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,16	75,64	0,49
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	-0,09
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,28	5,95	-0.34
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4.36%	4,75%	0.39%
5.	Indeks Gini (ratio)	0.316	0.305	-0.011

Capaian IPM Sumatera Barat Pada Tahun 2023 meningkat sebesar 0.49 poin pada tahun 2023 di angka 75,64 poin; tingkat kemiskinan membaik dengan adanya penurunan sebesar 0.09% persen pada angka 5.95 persen; tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan sebesar 0.34 persen pada angka 5,95 persen poin; pertumbuhan ekonomi juga mengalami kemajuan sebesar 0.39% pada angka 4.75% sampai dengan triwulan III di tahun 2023; dan rasio indeks gini juga memperlihatkan kemajuan dengan adanya penurunan sebesar 0.011 pada angka 0.305 persen poin pada tahun 2023. Secara lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2023 adalah 75,64 dengan rincian

komponen Angka Harapan Hidup di 74,14 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,11 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 9,28 tahun dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp.11.380,-(Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,60	73,88	74,14
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.09	14.10	14,11
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.07	9.18	9,28
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang /Th)	10.790	11.130	11.380
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT			74,56	75,16	75,64

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan capaian IPM Sumatera Barat juga di topang dengan kenaikan IPM pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, IPM tertinggi di Sumatera Barat yakni pada Kota Padang sebesar 83,93 dan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 65,79, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Manusia					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	63,98	64,83	65,79

Kab. Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	71,01	71,72	72,24
Kab. Solok	68,60	69,08	69,08	70,60	71,39	71,92
Kab. Sijunjung	66,97	67,66	67,74	70,48	71,32	72,30
Kab. Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	74,14	74,87	75,57
Kab. Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	72,92	73,67	74,54
Kab. Agam	71,10	71,70	72,37	73,20	73,84	74,44
Kab. Limapuluh Kota	68,69	69,17	69,67	71,03	71,64	72,05
Kab. Pasaman	64,94	65,60	66,46	68,48	69,12	69,85
Kab. Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	70,88	71,36	72,24
Kab. Dharmas Raya	70,40	70,86	71,52	72,65	73,19	73,87
Kab. Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	70,57	71,39	72,03
Kota Padang	81,58	82,25	82,68	83,30	83,69	83,93
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,53	79,35	79,66
Kota Sawah Lunto	71,13	71,72	72,39	74,35	75,21	75,91
Kota Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	78,52	79,28	79,76
Kota Bukit Tinggi	79,80	80,11	80,71	80,79	81,52	81,88
Kota Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	79,24	79,70	80,14
Kota Pariaman	75,71	76,26	76,70	78,72	79,31	79,76
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	74,56	75,16	75,64

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional Tahun 2023 maka IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 75,64 masih lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional yaitu sebesar 74,39, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
IPM Menurut Provinsi se Indonesia dan IPM Rata-Rata Nasional

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	74,11	74,70
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	74,51	75,13
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	75,16	75,64
Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	74,45	74,95
Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	73,11	73,73

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	72,48	73,18
Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	73,68	74,30
Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	71,79	72,48
Kep. Bangka Belitung	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	73,50	74,09
Kep. Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08
Dki Jakarta	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	82,77	83,55
Jawa Barat	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	73,63	74,24
Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,80	73,39
Di Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,65	81,09
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14	74,05	74,65
Banten	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	75,25	75,77
Bali	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	77,4	78,01
Nusa Tenggara Barat	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65	71,65	72,37
Nusa Tenggara Timur	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28	67,63	68,4
Kalimantan Barat	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	69,71	70,47
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	73,17	73,73
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	74,00	74,66
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	77,36	78,20
Kalimantan Utara	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	72,21	72,88
Sulawesi Utara	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30	74,52	75,04
Sulawesi Tengah	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79	71,01	71,66
Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	73,96	74,60
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,38	72,94
Gorontalo	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00	70,62	71,25
Sulawesi Barat	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36	69,19	69,80
Maluku	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71	72,04	72,75
Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76	70,26	70,98
Papua Barat	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26	66,72	67,47
Papua	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	62,16	63,01
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2023

Salah satu komponen IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, RLS yang tertinggi masih berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,94 tahun, diikuti oleh Kota Bukittinggi 11,64 tahun, Kota Padang 11,62 tahun, dan Kota Solok 11,36 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 7,76 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep Mentawai	6,95	7,08	7,09	7,20	7,48	7,76
Kab. Pesisir Selatan	8,14	8,25	8,26	8,27	8,43	8,58
Kab. Solok	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89	7,90
Kab. Sijunjung	7,77	8,10	8,11	8,12	8,30	8,57
Kab. Tanah Datar	8,44	8,45	8,61	8,62	8,90	9,02
Kab. Padang Pariaman	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16	8,41
Kab. Agam	8,69	8,85	8,96	8,57	8,98	9,22
Kab. Limapuluh Kota	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12
Kab. Pasaman	7,66	7,86	8,09	8,10	8,11	8,13
Kab. Solok Selatan	8,15	8,16	8,28	8,32	8,41	8,69
Kab. Dharmas Raya	8,25	8,46	8,47	8,55	8,56	8,71
Kab. Pasaman Barat	7,86	8,06	8,19	8,27	8,55	8,81
Kota Padang	11,33	11,34	11,58	11,59	11,60	11,62

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Solok	11,01	11,02	11,03	11,04	11,35	11,36
Kota Sawah Lunto	9,94	9,97	10,17	10,32	10,43	10,44
Kota Padang Panjang	11,44	11,45	11,62	11,63	11,92	11,94
Kota Bukit Tinggi	11,31	11,32	11,33	11,34	11,63	11,64
Kota Payakumbuh	10,46	10,72	10,73	10,81	10,82	10,88
Kota Pariaman	10,36	10,37	10,59	10,67	10,78	10,79
SUMATERA BARAT	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, AHH yang tertinggi berada di Kota Kota Bukittinggi sebesar 75,33 tahun, diikuti oleh Kota Padang 74,94 tahun dan Kota Payakumbuh 74,77 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Umur Harapan Hidup 71,06 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep. Mentawai	64,49	64,68	64,73	70,73	70,91	71,06
Kab. Pesisir Selatan	70,45	70,73	70,86	73,12	73,20	73,27
Kab. Solok	67,95	68,34	68,58	71,72	72,12	72,31

Kab. Sijunjung	65,69	66,02	66,21	71,93	72,27	72,59
Kab. Tanah Datar	69,38	69,73	69,94	73,69	73,84	74,19
Kab. Padang Pariaman	68,23	68,58	68,79	73,58	73,67	73,77
Kab. Agam	71,83	72,17	72,37	73,91	74,07	74,22
Kab. Limapuluh Kota	69,47	69,70	69,79	72,79	73,03	73,25
Kab. Pasaman	66,82	67,18	67,40	71,34	71,71	72,04
Kab. Solok Selatan	67,21	67,58	67,81	71,52	71,89	72,22
Kab. Dharmas Raya	70,73	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04
Kab. Pasaman Barat	67,37	67,67	67,82	71,83	72,14	72,44
Kota Padang	73,35	73,57	73,65	74,47	74,71	74,94
Kota Solok	73,14	73,45	73,61	73,98	74,31	74,56
Kota Sawahlunto	69,59	69,87	70,00	73,20	73,50	73,79
Kota Padang Panjang	72,58	72,77	72,82	73,93	74,03	74,24
Kota Bukit Tinggi	73,91	74,22	74,38	74,70	75,02	75,33
Kota Payakumbuh	73,33	73,61	73,74	74,18	74,48	74,77
Kota Pariaman	69,87	70,15	70,28	73,69	73,98	74,20
SUMATERA BARAT	69,01	69,31	69,47	73,60	73,88	74,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat terlihat pada tahun 2023 adalah Rp. 11.380.000 Rupiah/Orang/Tahun. Pengeluaran perkapita yang tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang sebesar Rp. 15.089.000,-/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp. 13.978.000,-/Orang/Tahun dan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 13.859.000,-/Orang/Tahun. Sedangkan yang terendah pengeluaran perkapitanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 6.891.000,-

/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep, Mentawai	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567	6.891
Kab. Pesisir Selatan	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686	9.953
Kab. Solok	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539	10.717
Kab. Sijunjung	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582	11.018
Kab. Tanah Datar	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695	10.905
Kab. Padang Pariaman	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159	11.432
Kab. Agam	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171	10.402
Kab. Limapuluh Kota	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035	10.285
Kab. Pasaman	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619	8.908
Kab. Solok Selatan	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560	10.884
Kab. Dharmas Raya	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901
Kab. Pasaman Barat	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381	9.538
Kota Padang	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889	15.089
Kota Solok	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515	12.709
Kota Sawah Lunto	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537	10.829
Kota Padang Panjang	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153	11.310

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bukit Tinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633	13.859
Kota Payakumbuh	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687	13.978
Kota Pariaman	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150	13.355
SUMATERA BARAT	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan dari tahun ke tahun, dan ukuran garis kemiskinan antar daerah dan antar Kabupaten/Kota juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret 2018 – Maret 2023

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
PERKOTAAN					
Maret 2018	356.907	139.235	496.142	114.840	4,86
Sept 2018	367.319	140.238	507.557	125.580	4,99
Maret 2019	382.490	143.519	526.008	121.350	4,76
Sept 2019	402.124	149.242	551.366	120.580	4,71
Maret 2020	411.369	151.198	562.567	128.120	4,97
Sept 2020	413.073	152.458	565.531	141.310	5,22
Maret 2021	424.106	156.831	580.937	145.580	5,30
Sept 2021	431.008	161.294	592.302	134.530	4,83
Maret 2022	453.326	169.253	622.579	137.610	4.95
Sept 2022	490.322	178.321	668 643	140 330	4,90
Maret 2023	501.157	181.358	682 515	133 790	7,23
PEDESAAN					
Maret 2018	369.087	91.162	460.249	242.290	8,07
Sept 2018	370.529	95.901	466.430	227.660	7,90
Maret 2019	382.217	101.722	483.939	226.870	7,88
Sept 2019	401.904	108.552	510.457	222.510	7,69
Maret 2020	415.694	112.136	527.830	216.119	7,43
Sept 2020	416.419	113.254	529.673	223.470	7,83
Maret 2021	438.205	117.976	556.181	225.090	7,91
Sept 2021	444.693	121.531	566.224	205.390	7,23
Maret 2022	470.942	127.489	598.431	197.600	6,86
Sept 2022	500.796	138.150	638 946	203 490	7,20
Maret 2023	512.376	140.333	652 709	206 570	4,67
KOTA + DESA					
Maret 2018	364.235	112.319	476.554	357.130	6,65

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
Sept 2018	369.207	116.426	485.633	353.240	6,55
Maret 2019	382.233	121.319	503.652	348.220	6,42
Sept 2019	402.003	127.697	529.700	343.090	6,29
Maret 2020	413.832	130.483	544.315	344.230	6,28
Sept 2020	414.949	132.292	547.240	364.790	6,56
Maret 2021	431.644	137.059	568.703	370.670	6,63
Sept 2021	438.308	141.237	579.545	339,930	6,04
Maret 2022	462.910	148.030	610.941	335.210	5.92
Sept 2022	495.824	158.370	654 194	343.820	6,04
Maret 2023	507.000	160.925	667 925	340.370	5,95

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara umum, pada periode Maret 2018 – Maret 2023, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan cukup signifikan dari 357.130 jiwa (Maret 2018), menjadi 340.370 jiwa (Maret 2023). Secara persentase juga mengalami penurunan dari 6,65% (Maret 2018) menjadi 5,95% (Maret 2023). Jika dilihat capaian pada tahun 2023 pada keadaan September 2022 ke Maret 2023 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 6,04% menjadi 5,95% atau turun tipis sebesar 0,09%, dan penurunan jumlah penduduk miskin dari 343.820 jiwa pada September 2022 menjadi 340.370 jiwa di Maret 2023 atau turun sebesar 3.450 jiwa.

Tabel 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2018 – Maret 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,55

Sept 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,90	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
Sept 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
Sept 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56
Maret 2021	145.580	225.090	370.670	5,30	7,91	6,63
Sept 2021	134.530	205.390	339.930	4,83	7,23	6,04
Maret 2022	137.610	197.600	335.210	4.95	6,86	5.92
Sept 2022	140 330	203 490	343 820	4,90	7,20	6,04
Maret 2023	133 790	206 570	340 370	7,23	4,67	5,95

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
Sept 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
Sept 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
Sept 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	0,782	0,943	0,862
Maret 2023	0,687	0,956	0,821
P2			
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
Sept 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
Sept 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
Sept 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,16
September 2022	0,168	0,180	0,174
Maret 2023	0,154	0,200	0,177

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pada periode September 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0,862 turun 0,041 poin menjadi 0,821 pada Maret 2023. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan sebesar 0,003 dari 0,174 pada September 2022 menjadi 0,177 pada Maret 2023.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2023 Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,687 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,956, nilai ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan pada Maret 2023 sebesar 0,200 dibandingkan perkotaan 0,154 di periode yang sama. Terjadi kenaikan tipis indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,02 poin yakni dari 0,180 pada September 2022 menjadi 0,200 pada Maret 2023. Sedangkan di perkotaan terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,014 poin yakni dari 0,168 pada September 2022 menjadi 0,154 pada Maret 2023. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan.

2.1.3 Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Provinsi Sumatera Barat. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,94 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,94 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Tabel 2.11
TPT menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2023

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	2,31	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
2	Kab. Pesisir Selatan	6,03	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
3	Kab. Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
4	Kab. Sijunjung	3,22	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71
5	Kab. Tanah Datar	4,01	3,20	4,79	4,63	5,91	5,35
6	Kab. Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60	6,69
7	Kab. Agam	4,93	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
9	Kab. Pasaman	6,04	5,28	5,04	4,92	5,38	5,09
10	Kab. Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
11	Kab. Dharmasraya	4,02	5,06	5,31	5,00	6,23	6,22

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Kab. Pasaman Barat	3,36	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
13	Kota Padang	9,29	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86
14	Kota Solok	6,03	7,06	8,35	5,15	3,90	3,72
15	Kota Sawahlunto	5,92	6,84	8,20	6,38	5,00	4,98
16	Kota Padang Panjang	5,35	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
17	Kota Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99
18	Kota Payakumbuh	3,95	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
19	Kota Pariaman	5,82	5,48	5,73	6,09	5,19	5,68
	Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

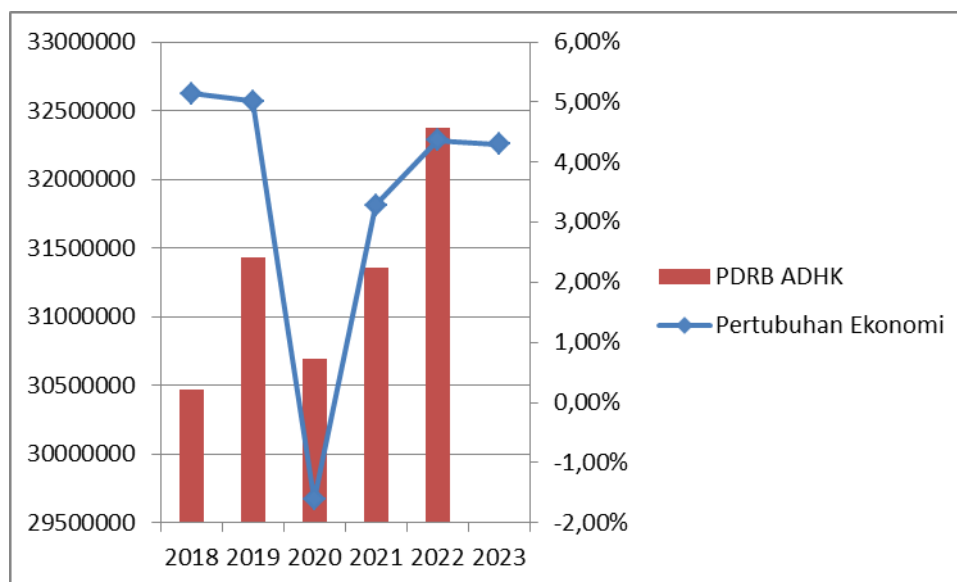
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan bagaimana capaian pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2018- 2023 cenderung melambat, kecuali di tahun 2020 mengalami kontraksi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama lima tahun ini trennya melambat tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak terlalu jauh nilainya dari pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Sumatera Barat yang sempat tumbuh 5,66% pada tahun 2018 justru terus menurun hingga mencapai angka 5,38 % pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Capaian pertumbuhan ekonomi

Sumatera Barat yang pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,97%, namun masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 5,05%.

Grafik 2.1
PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2023

Laju Pertumbuhan PDRD Sumatera Barat menurut Lapangan usaha yang memiliki daya ungkit besar yakni Lapangan usaha sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,63% disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,44%, sektor Jasa Lainnya mencapai angka tertinggi pada 10,39%. Situasi ini merupakan parameter normalnya tata kehidupan pasca pandemi yang mengakibatkan aktifitas publik berjalan lancar seperti biasa.

Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memegang kontribusi yang cukup dominan terhadap struktur PDRB Sumatera Barat sebesar 21,71% masih memiliki laju pertumbuhan tipis dari tahun lalu sebesar 4,16% dan Sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan sebesar 4,15%. Adapun secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
(PDRB ADHK) Tahun 2018-2023 (%)**

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian,Ke- hutan & Perikanan	3,54	2,48	1.16	2.18	3,52	4,16
2. Pertambanga n dan Penggalian	5,79	6,22	-1.31	-1.77	1,94	0,89
3. Industri Pengolahan	-0,57	-1,98	-0.54	3.68	1,74	5,04
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,09	4,20	-6.81	3.15	3,21	5,11
5. Pengadaan Air,Pengelola an Sampah dan Daur Ulang	2,24	6,10	-1.04	5.53	4,37	-1,21
6. Konstruksi	7,04	8,47	-2.95	2.18	2,51	4,61
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	7,29	-1.14	5.12	5,60	4,15
8. Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,75	-16.10	2.56	5,73	5,22

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,23	8,11	-15.95	5.63	15,80	9,44
10. Informasi dan Komunikasi	8,57	8,73	9.55	6.42	7,02	7,48
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	2,29	1.34	8.46	4,54	1,55
12. Real Estate	4,67	6,78	0.22	2.41	5,78	5,60
13. Jasa Perusahaan	5,45	6,20	-3.98	1.13	7,33	6,84
14. Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,97	6.96	-0.59	0.86	0,89	9,63
15. Jasa Pendidikan	7,19	7,94	5.03	1.84	5,13	3,15
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,54	8.83	5.88	4,54	6,18
17. Jasa Lainnya	7,86	7,50	-10.10	7.10	11,88	10,39
PDRB SUMATERA	5,16	5,01	-1.62	3.29	4,36	4,97

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BARAT						

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pasca Pandemi covid-19 (2022-2023) Lapangan usaha jasa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam mendongkrak PDRB. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan dan Jasa lainnya naik pada angka yang cukup tinggi. Dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat yang cukup lama terkekang oleh kebijakan lock down dan pembatasan aktivitas, lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan minum melonjak mencapai 9,44%, Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial mencapai 9,63%.

Tabel 2.13

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Barat, 2018-2022 (Persen)

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	23.17	22.15	22.36	21.69	21.20
2. Pertambangan dan Penggalan	4.27	4.30	4.27	4.19	4.09
3. Industri Pengolahan	9.10	8.38	8.64	8.79	8.54
4. Pengadaan Listrik & Gas	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
5. Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.09	0.9
6. Konstruksi	9.63	10.09	10.18	10.20	10.6
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.30	15.79	15.77	15.77	14.71
8. Transportasi dan Pergudangan	12.65	12.60	10.44	10.30	10.88
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.37	1.43	1.24	1.27	1.35
10. Informasi dan Komunikasi	5.46	5.81	6.43	6.62	6,68
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.01	2.91	3.04	3.28	3.23
12. Real Estate	1.96	2.01	2.06	2.05	2.02
13. Jasa Perusahaan	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.92	6.13	6.72	6.90	6.52
15. Jasa Pendidikan	4.20	4.35	4.71	4.64	4.62

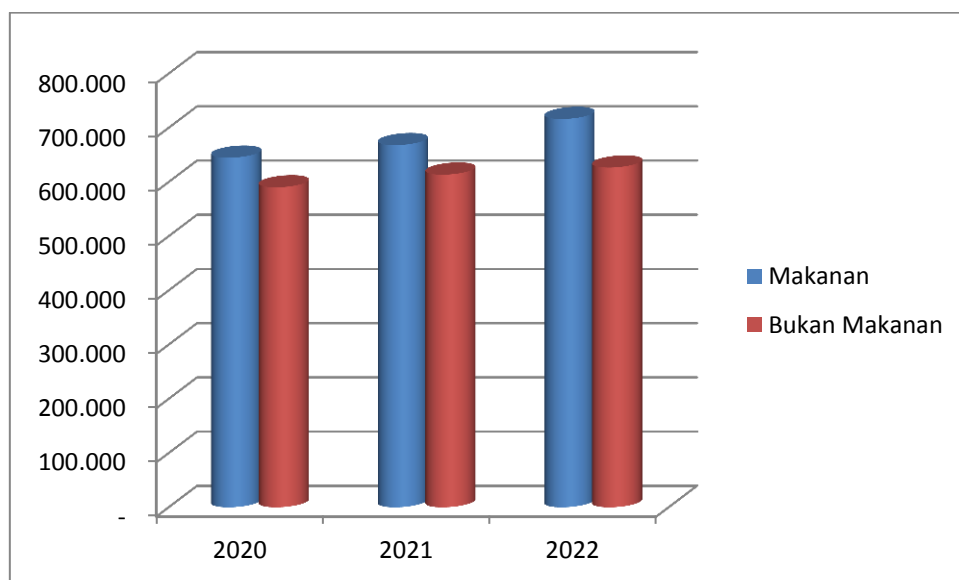
LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.39	1.42	1.62	1.69	1.65
17. Jasa Lainnya	1.93	2.00	1.88	1.95	2.05
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Perkembangan kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita penduduk Sumatera Barat senilai 1.235.050 rupiah per bulan. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.281.658 rupiah. Proporsi pengeluaran penduduk Sumatera Barat untuk makanan masih lebih besar dari pada bukan makanan.

Grafik 2.2

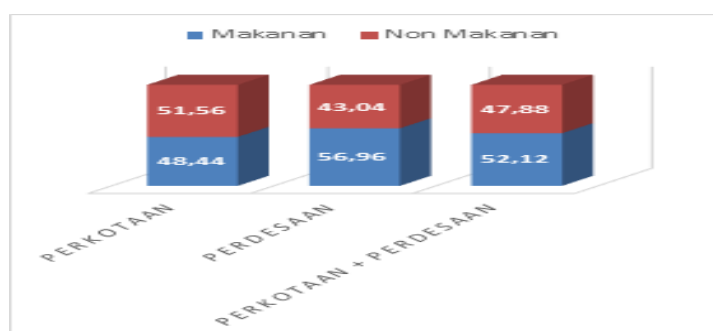
**Perkembangan Rata-rata Pengeluaran perkapita
Sumatera Barat (Rp/bln), 2020-2022**



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2023

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dan non makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2022 persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran non makanan yakni sekitar 52,12 persen. Kalau dilihat menurut daerah kota dan desa maka terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan masih tinggi komposisinya di daerah pedesaan yakni masih sekitar 56,96 persen dan di daerah perkotaan sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 48,44 persen.

Grafik 2.3
Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan
di Sumatera Barat Menurut Tipe Daerah Tahun 2022



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 53,49%. Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,62% dan pengeluaran konsumsi pemerintah 10,12%. Laju pertumbuhan dan distribusi menurut pengeluaran Tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2022 (persen)

komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010						Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,62	4,74	-2,47	1,97	4,41	52,69	53,23	54,41	54,09	53,88	53,49
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	4,15	6,54	11,85	-4,39	1,79	4,91	1,05	1,06	1,14	1,12	1,11	1,08
Pengeluaran Konsumsi Pemeintah	-0,83	4,40	5,00	-8,64	0,15	2,77	12,57	12,59	12,58	11,84	11,53	10,12
Pembentukan Modal tetap Bruto	4,43	3,52	5,16	-2,70	1,80	2,26	29,93	29,82	30,11	30,00	30,30	28,62
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	0,07	0,11	0,04	0,15	0,15	0,35
Ekspor Luar Negeri	18,77	-6,83	-7,52	-3,31	53,53	-	12,73	11,07	9,01	8,95	16,25	-
Impor Luar Negeri	11,13	0,31	-14,31	-53,85	59,55	-	3,46	4,05	2,92	1,40	2,17	-
Net Ekspor Barang & Jasa	-9,55	-76,69	-	-	-	-	-5,59	-3,83	-4,36	-4,73	11,44	6,33
PDRB SUMATERA BARAT	5,30	5,14	5,01	-1,60	3,29	4,54	100	100	100	100	100	100

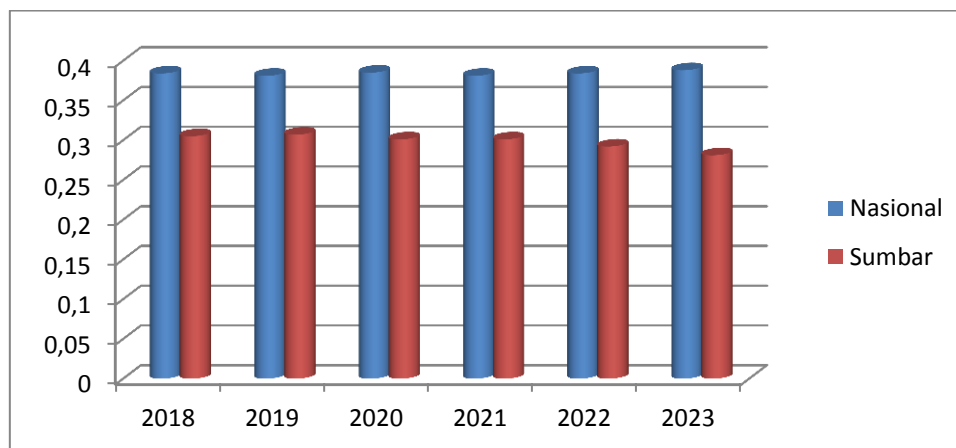
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2023

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada garafik berikut :

Grafik 2.6

Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio serta persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,280. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,300. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 (0,306), tercatat penurunan sebesar 0,006 poin. Sedangkan untuk nasional ketimpangan pengeluaran penduduk sebesar 0,388.

Tabel 2.16
Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat
Tahun 2018-2023

Daerah Tempat Tinggal	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret
Perkotaan	0,305	0.329	0.329	0.323	0.314	0.338
Perdesaan	0,242	0.247	0.254	0.257	0.267	0.280
Perkotaan + Perdesaan	0,280	0.300	0.306	0.305	0.306	0.321

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area pekotaan lebih tinggi dibandingkan area perdesaan. Pada kondisi Maret 2023 Gini Ratio perkotaan adalah 0,305 turun jika dibandingkan periode setahun sebelumnya (0,329). Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio Maret 2023 menunjukkan angka 0,242 turun sebesar 0,058 poin dari Maret 2022 yang tercatat sebesar 0.300.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat ini berusaha untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023.

Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 dilihat dari capaian indikator makro yang diukur melalui 7 indikator yaitu

- 1) Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian indeks sebesar 75,64%;
- 2) Tingkat Kemiskinan dengan capaian 5,95% pada keadaan Maret 2023;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian 5,95%;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian pada level 4,75%; dan
- 5) Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio dengan capaian indeks 0.305 pada tahun 2023.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini dibuat dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.